



Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Wisata Bahari Tlocor di Desa Kedungpandan

Meylani Wulandari¹⁾, Hendra Sukmana²⁾

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Meylaniwulandari066@gmail.com¹⁾

Hendra.sukmana@gmail.com²⁾

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Desa Kedungpandan menjadi salah satu desa wisata mandiri yang sudah terverifikasi. Selain itu, Desa Kedungpandan juga memiliki potensi alam yang luar biasa dan perlu pengembangan wisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah desa dalam pengembangan Wisata Bahari Tlocor di Desa Kedungpandan, Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah peran pemerintah desa dalam pengembangan Wisata Bahari Tlocor di Desa Kedungpandan menunjukkan bahwa: (1) peran pemerintah desa sebagai motivator, sudah sesuai dengan teori yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kenyataan pada saat observasi di lapangan. (2) peran pemerintah desa sebagai fasilitator, belum sesuai dengan teori yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kenyataan pada saat observasi di lapangan, karena minimnya anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa. Selain itu, pemerintah desa juga belum memiliki surat kepemilikan tempat wisata. (3) peran pemerintah desa sebagai dinamisator, belum sesuai dengan teori yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kenyataan pada saat observasi di lapangan, karena pemerintah desa belum dapat mengelola serta mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki.

Kata Kunci: Pengembangan Wisata; Peran Pemerintah Desa

Abstract

The aim of this research is to describe and analyze the role of the village government in developing Tlocor Marine Tourism in Kedungpandan Village. This research uses qualitative descriptive research methods by conducting interviews, observation and documentation. This research uses data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of this research are the role of the village government in developing Tlocor Marine Tourism in Kedungpandan Village, showing that: (1) the role of the village government as a motivator is in accordance with established theory and in accordance with reality during field observations. (2) the role of the village government as a facilitator is not in accordance with the established theory and in accordance with the reality during field observations, due to the minimal budget managed by the village government. Apart from that, the village government also does not have ownership documents for tourist attractions. (3) the role of the village government as a dynamist is not yet in accordance with established theory and in accordance with the reality at the time of field observations, because the village government has not been able to manage and develop the potential resources it has.

Keyword: Tourism Development; The Role Of Village Government



PENDAHULUAN

Desa Kedungpandan terletak di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, hanya 20 km dari pusat Kota Sidoarjo. Desa Kedungpandan memiliki potensi pariwisata yang luar biasa karena letaknya yang strategis dan panoramanya yang indah. Pengembangan Wisata Bahari Tlocor merupakan upaya pemerintah desa Kedungpandan yang didukung oleh Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang otonomi desa. Otonomi desa merupakan sebuah konsep dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang memberikan hak dan wewenang kepada desa dalam mengatur urusan pemerintahannya. (Iswanti, 2022). Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Pariwisata adalah suatu kegiatan yang dapat dilakukan oleh semua orang dengan memanfaatkan waktu luang untuk menikmati keindahan alam (Sumarno, 2009). Adapun regulasi pendukung Peraturan Daerah Jawa Timur No. 4 Tahun 2022 tentang pengembangan desa wisata menjadi landasan hukum penting dalam mengarahkan pengembangan Desa Kedungpandan sebagai destinasi wisata (Yelvita, 2022). Dalam peraturan tersebut, dijelaskan pentingnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan wisata.

Peran pemerintah desa dalam pengembangan Wisata Bahari Tlocor selama ini ialah melakukan penambahan sarana prasarana yaitu berupa perbaikan jalan dan penambahan jalan dengan melakukan pavingisasi di sekitar Wisata Bahari. Selain itu pemerintah desa juga mendirikan Gedung Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), yang mana BUMDES menjadi pilar penting bagi kegiatan ekonomi Masyarakat desa. Selain itu, pemerintah desa juga melakukan branding wisata dengan memberikan izin kepada para komunitas untuk mengadakan event di Wisata Bahari Tlocor, pemerintah desa juga memberikan izin kepada universitas maupun mahasiswa untuk melakukan pengabdian Masyarakat di wilayah wisata.

Berdasarkan observasi di lapangan terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengembangan Wisata Bahari Tlocor di Desa Kedungpandan diantaranya pertama, Pemerintah desa sudah memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mengembangkan Wisata Bahari Tlocor. Pemerintah desa sudah memberikan motivasi tiada henti kepada pengelola maupun Masyarakat dengan berupa materiil maupun non materiil. Minimnya sarana prasarana yang tersedia di Wisata Bahari Tlocor terkait spot foto, arena outbound sebagai daya Tarik wisatawan. Kedua, Minimnya dana yang digunakan pemerintah desa dalam pengembangan pariwisata ini juga menjadi kendala yang paling penting. Di samping itu, letaknya di sempadan Sungai dimana wilayah tersebut masih menjadi kewenangan dari Badan Wilayah Pengembangan Sungai (BPWS). Ketiga, Bahari Tlocor, sebagai salah satu objek wisata bahari yang potensial, seharusnya memiliki masyarakat di Bahari Tlocor belum mengasah kemampuan mereka untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Dalam upaya mengatasi hal ini, pemerintah desa telah memberikan bantuan kepada masyarakat dengan memberikan pelatihan terkait pembuatan cinderamata.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul "Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Wisata Bahari Tlocor di Desa Kedungpandan". Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah "bagaimana peran pemerintah desa dalam pengembangan Wisata Bahari Tlocor di Desa Kedungpandan?" Adapun tujuan dilakukannya kajian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah desa dalam pengembangan Wisata Bahari Tlocor di Desa Kedungpandan.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Lokasi ini dipilih karena Desa Kedungpandan telah dinyatakan sebagai salah satu desa wisata yang diakui sebagai pesona Indonesia dengan tipe desa wisata mandiri. Penelitian ini menganalisis fenomena lapangan secara sistematis dan ilmiah dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Dua jenis data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung selama proses penelitian, seperti hasil.

Pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini agar peneliti dapat menganalisis dan mendeskripsikan fenomena yang ditemukan selama penelitian untuk membuat kesimpulan. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pemerintah desa membantu mengembangkan Wisata Bahari Tlocor di Desa Kedungpandan. Untuk memilih sampel informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yakni, Kepala Dusun Tlocor, kaur perencanaan Desa Kedungpandan, kepala BUMDES, dan kasi transportasi adalah informan penting dalam studi ini. Dalam studi ini, periset menggunakan bentuk kajian data Miles & Huberman pertama. Metode ini memungkinkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, pengumpulan data juga dapat dilakukan dengan mengurangi dan mengubah data yang diperoleh dari hasil observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengembangan wisata Bahari Tlocor, keterlibatan pemerintah desa merupakan faktor krusial. Contohnya, pemerintah desa Kedungpandan telah menjadi penggerak dalam pengembangan wisata tersebut, seperti yang terungkap dalam hasil analisis data penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan. (Zizwatin Ainia, 2021).

1. Motivator

Peran pemerintah desa sebagai motivator dalam pengembangan pariwisata sangat diperlukan untuk mengembangkan pariwisata tersebut. Motivasi yang diberikan oleh pemerintah desa ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan wisata Bahari Tlocor. Menurut Usman, Motivasi ialah dorongan yang dimiliki seseorang yang menjadi dasar untuk melakukan suatu Tindakan. (Nugrahaeni, 2015). Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada saat observasi di lapangan dengan melakukan wawancara kepada beberapa sampel, peneliti menemukan adanya motivasi yang diberikan oleh pemerintah Desa Kedungpandan dalam pengembangan Wisata Bahari Tlocor. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Akhmadi selaku kaur perencanaan desa Kedungpandan:

“Pemerintah desa merasa tidak kurang-kurang dalam memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mengembangkan wisata Bahari Tlocor. Hal ini terlihat dari berbagai cara yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan anggaran setiap tahunnya untuk pengembangan wisata Bahari Tlocor. Anggaran tersebut diserahkan kepada Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) yang bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan pengembangan wisata ini.” (wawancara dengan Bapak Akhmadi selaku kaur perencanaan desa Kedungpandan, Jumat 13 Oktober 2023).

Dalam wawancara dengan Bapak Akhmadi, selaku Kaur Perencanaan Desa Kedungpandan, pada Jumat 13 Oktober 2023, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sangat serius dalam mengembangkan wisata Bahari Tlocor. Mereka sadar akan potensi yang dimiliki oleh wisata Bahari Tlocor dan melihatnya sebagai salah satu sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pernyataan ini didukung dari wawancara dengan Bapak Kasiono selaku Ketua Bumdes Mitra Abadi Desa Kedungpandan.

“tentunya pemerintah desa mendukung sepenuhnya pengembangan wisata Bahari Tlocor, terlebih lagi wisata ini sudah masuk ke segmen usaha dari Bumdes unit usaha wisata”. (wawancara dengan Bapak Kasiono selaku ketua Bumdes Mitra Abadi Kedungpandan Minggu 14 Oktober 2023).

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kasiono, terlihat bahwa Bumdes Mitra Abadi Kedungpandan memberikan peran yang cukup besar dalam pengembangan wisata Tlocor. Keberhasilan dalam pengelolaan objek wisata Tlocor akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan dari wisata tersebut, sehingga akan mendorong pertumbuhan bisnis pariwisata di desa tersebut. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berkelanjutan dan motivasi dari pemerintah desa Kedungpandan kepada para pelaku wisata untuk terus mengembangkan objek wisata Bahari Tlocor sehingga dapat menjadi destinasi wisata yang lebih menarik dan populer di kalangan masyarakat. Namun, untuk pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah desa, dibutuhkan perencanaan yang terperinci dan terukur agar pengembangan tersebut sesuai dengan rencana. Selain itu, pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk menjaga kelestarian alam dan ekosistem di lokasi wisata, sehingga kerusakan lingkungan bisa diminimalkan. Pemerintah desa Kedungpandan juga mempromosikan Wisata Bahari Tlocor dengan melakukan Kerjasama dengan berbagai komunitas dengan bentuk memberikan izin untuk komunitas melakukan event di sekitar wilayah Bahari Tlocor, selain itu pemerintah Desa Kedungpandan juga menggunakan media sosial untuk media promosi.



Gambar 1. Bentuk Promosi Wisata Bahari Tlocor

Promosi melalui media sosial, terutama melalui Instagram, telah menjadi salah satu strategi pemasaran yang efektif dalam menarik perhatian wisatawan. Pemerintah desa Kedungpandan telah menggunakan media sosial salah satunya Instagram sebagai media untuk pemerintah desa melakukan promosi dengan menampilkan panorama serta keindahan yang dimiliki Wisata Bahari Tlocor. Upaya ini dilakukan untuk menarik perhatian wisatawan yang ingin mengunjungi Wisata Bahari Tlocor. Hal itu dibuktikan dari hasil wawancara bersama Bapak Baidowi selaku Kepala Dusun Tlocor Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon.

“kami sering memberikan izin kepada komunitas untuk mengadakan event, Kunjungan-kunjungan ataupun acara yang menggunakan kawasan wisata Bahari Tlocor dengan mengundang OPD ataupun kedinasan lain sudah cukup sering dilakukan. Adanya kegiatan tersebut pemerintah desa berharap bisa menarik wisatawan untuk melakukan kunjungan di wisata Bahari Tlocor serta berharap wisata Bahari Tlocor semakin dikenal oleh Masyarakat luas”. (wawancara dengan Bapak Baidowi selaku Kepala Dusun Tlocor Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon, Senin 2 Oktober 2023).

Fenomena yang terjadi dilapangan jika dihubungkan berdasarkan teori pengembangan wisata telah sesuai dengan pendapat Pitana dan Gayatri (2005) Jika fenomena di lapangan dihubungkan dengan teori pengembangan wisata, Pitana dan Gayatri (2005) berpendapat bahwa pemerintah Desa Kedungpandan, sebagai motivator pengembangan wisata bahari, memiliki peran yang sangat penting dalam memotivasi masyarakat setempat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kelestarian lingkungan serta berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan wisata bahari. Faktor utama dalam pengembangan wisata adalah motivasi, Pelatihan merupakan salah satu motivasi yang diberikan oleh pemerintah Desa Kedungpandan. Pemerintah desa Kedungpandan juga mempromosikan wisata melalui media sosial.

2. Fasilitator

Dalam konteks ini, pemerintah desa memiliki peran sebagai fasilitator dalam menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung pengembangan potensi objek wisata yang terdapat di wilayahnya. Fasilitator ialah seseorang atau pemerintah yang menjadi penanggungjawab dalam menyelesaikan suatu fenomena atau situasi yang ada di Masyarakat dengan menggunakan strategi khusus untuk mencapai tujuan. Pertama, berupa sarana prasarana dapat dibuktikan dengan hasil wawancara oleh Bapak Baidowo selaku kepala Dusun Tlocor Kecamatan Jabon.

“pemerintah desa sudah memberikan fasilitas terkait sarana prasarana berupa perbaikan jalan menuju objek wisata seperti melakukan pavingisasi, selain itu pemerintah desa juga mendirikan Gedung Bumdes serta kios PKL untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat. Gedung Bumdes dibangun dengan tujuan untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat desa. Bumdes atau Badan Usaha Milik Desa adalah sebuah bentuk usaha yang dikelola oleh masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian lokal”. (wawancara dengan Bapak Baidowi selaku kepala Dusun Tlocor Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon, Senin 2 Oktober 2023).

Pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Akhmadi selaku kaur perencanaan desa Kedungpandan.

“saat ini kami pihak bumdes sedang mengerjakan pembuatan lapak pedagang bagi Masyarakat sekitar tentunya menggunakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah desa Kedungpandan.”. (wawancara dengan Bapak Kasiono selaku Ketua Bumdes Mitra Abadi Kedungpandan, Sabtu 14 Oktober 2023).



Gambar 2. Pembangunan Ruko PKL

Saat ini, wisata Bahari Tlocor sedang melakukan Pembangunan lapak pedangan di sekitar wilayah Bahari Tlocor. Selain itu, peran Bumdes Mitra Abadi Kedungpandan dalam mengerjakan pembangunan lapak pedagang juga sangat signifikan. Dalam hal ini, Bumdes bekerja sama dengan pemerintah desa untuk memastikan bahwa pembangunan lapak pedagang dilakukan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam mengembangkan fasilitas dan sarana prasarana di Wisata Bahari Tlocor, ditemukan kendala yang signifikan yaitu minimnya anggaran yang dimiliki pemerintah desa. Faktor ini menjadi penghambat dalam pengembangan dan pemeliharaan fasilitas yang ada, serta pembangunan fasilitas baru yang dibutuhkan oleh pengunjung. Pernyataan ini didukung oleh wawancara dengan bapak Baidowi selaku kepala Dusun Tlocor Kecamatan Jabon.

“seharusnya suatu objek wisata memiliki ikon atau spot foto untuk menarik minat wisatawan, akan tetapi hingga saat ini wisata Bahari tlocor belum memiliki ikon ataupun spot foto yang menarik. Pemerintah desa merencanakan untuk membangun spot foto serta membuat area outbound untuk menarik wisatawan, tetapi hingga sekarang belum dapat teralisasi karena minimnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah.” (wawancara dengan Bapak Baidowi selaku Kepala Dusun Tlocor Kecamatan Jabon, Senin 2 Oktober 2023).

Tabel 3.
Anggaran APBDes Kedungpandan untuk Pengembangan Wisata Bahari Tlocor

No	Tahun	Jumlah
1	2021	Rp. 50.000.000
2	2022	Rp. 50.000.000
3	2023	Rp. 45.000.000

Sumber: Diolah oleh Pemerintah Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon, (2023)

Dari tabel diatas, dana tersebut akan digunakan dengan sebaik mungkin untuk mengelola wisata Bahari Tlocor. Dapat dilihat pada tahun 2021 dan 2022 pemerintah memberikan jumlah anggaran yang sama yakni sebanyak 50 Juta. Akan tetapi pada tahun ini, pemerintah hanya memberikan 45 juta, karena ada anggaran lain yang harus dikeluarkan oleh pemerintah desa. Menurut pemerintah desa, anggaran tersebut hanya cukup untuk memperbaiki sarana prasarana yang ada, jika untuk menambah fasilitas berupa spot foto sebagai ikonik ataupun mendirikan arena outbound anggaran yang dimiliki pemerintah masih belum mencukupi.

Ketiga, pemerintah desa belum bisa mengelola sepenuhnya wilayah yang ada di wisata Bahari Tlocor karena pemerintah desa belum memiliki surat izin kepemilikan wisata. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara oleh Bapak Baidowi selaku Kepala Dusun Tlocor Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon.

“area yang kami Kelola berada di sepadan Sungai sedangkan wilayah tersebut masih menjadi kewenangan dari BPWS, dari BPWS sendiri belum mau mengeluarkan surat izin kepemilikan wisata. Oleh karena itu, kami dan pokdarwis belum bisa mengakses seluruhnya wilayah yang ada di Wisata Bahari Tlocor.” (wawancara dengan Bapak Baidowi selaku Kepala Dusun Tlocor Desa Kedungpandan, Senin 2 Oktober 2023).

Fenomena yang terjadi dilapangan jika dihubungkan dengan teori pengembangan wisata belum sesuai dengan teori yang dikemukakan Pitana dan Gayatri, dalam pengembangan suatu objek wisata, pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dengan mempermudah penyediaan infrastruktur yang diperlukan dalam objek wisata. Namun, dalam pengembangan Wisata Bahari Tlocor, peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pengembangan wisata dapat dikatakan belum berhasil karena pemerintah desa belum dapat memenuhi fasilitas yang dibutuhkan untuk aktivitas Masyarakat karena minimnya anggaran yang dikelola oleh pemerintah. Untuk mencegah konflik kepemilikan di masa depan, pemerintah desa juga harus memiliki hak milik secara resmi terkait objek wisata tersebut. Idealnya, sebuah tempat wisata harus memiliki surat izin kepemilikan wisata. Namun, pemerintah desa belum memiliki hak milik resmi atas objek wisata Bahari Tlocor.

3. Dinamisator

Pembangunan yang diinginkan menurut prinsip pemerintahan yang baik adalah melibatkan partisipasi masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Oleh karena itu, tugas pemerintah desa Kedungpandan adalah mengelola kerjasama yang efektif antara pemerintah dan bisnis swasta, serta bertanggungjawab atas pengembangan Wisata Bahari Tlocor. Sebagai penggerak utama, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah desa harus memotivasi partisipasi aktif masyarakat selama proses pembangunan sektor pariwisata. Hal tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah desa, dapat dibuktikan dari hasil wawancara oleh Bapak Arifin selaku kasi pemerintahan bidang transportasi Desa Kedungpandan.

“setiap satu bulan sekali pemerintah desa melakukan evaluasi pengembangan wisata Bahari Tlocor, dihadiri oleh pihak Bumdes, pengelola wisata, dan pemerintah desa. Disana kita menyampaikan aspirasi terkait apa saja yang kurang dalam pengembangan wisata Bahari tlocor kemudian mencari penyelesaiannya”. (wawancara dengan Bapak Arifin selaku kasi pemerintahan bidang transportasi Desa Kedungpandan, Jumat 13 Oktober 2023).



Gambar 4. Pelatihan Pembuatan Buah Tangan

Gambar 4 merupakan salah satu contoh pelatihan yang diselenggarakan oleh perwakilan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang berlangsung di Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon. Menurut pendapat Pitana dan Gayatri pemerintah sebagai dinamisator memiliki peran untuk memberikan bimbingan, pelatihan promosi serta pengarahan untuk mengelola potensi sumber daya yang ada di wilayahnya. Pemerintah Desa Kedungpandan telah memberikan pelatihan untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya. hal tersebut dapat dibuktikan oleh hasil wawancara bersama Kasi Pemerintahan Transportasi Desa Kedungpandan yaitu Bapak Arifin.

“kalau untuk pelatihan sudah sering diberikan tapi dominan yang mengikuti pelatihan pengurus inti dari pengelola wisata itu sendiri bukan untuk Masyarakat luas. Biasanya pelatihan diadakan pemerintah desa dan bekerja sama dengan mahasiswa yang sedang melakukan program pemberdayaan Masyarakat. Baru-baru ini juga dilakukan bimbingan teknis di luar kota yang diadakan oleh pihak Bumdes.” (wawancara Bapak Arifin selaku Kasi Pemerintahan bidang Transportasi Desa Kedungpandan, Jumat 13 Oktober 2023).

Berdasarkan pernyataan di atas, pemerintah desa Kedungpandan sudah memberikan bimbingan teknis atau pelatihan kepada pengelola wisata. Akan tetapi, seharusnya pelatihan diberikan kepada seluruh Masyarakat di Desa Kedungpandan agar Masyarakat bisa mengasah kemampuan dalam mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya.

Teori Pitana dan Gayatri menyatakan bahwa pemerintah desa membantu masyarakat setempat belajar membuat kerajinan dengan menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Namun, fenomena yang terjadi di lapangan tidak sejalan dengan teori ini. Namun, peran pemerintah desa sebagai penggerak pengembangan wisata Bahari Tlocor belum sepenuhnya berhasil. Salah satu kendala utama yang muncul adalah pemerintah desa belum memberikan peluang, modal, dan tempat untuk memasarkan produk kerajinan tangan lokal. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pelatihan keterampilan dan penyediaan modal kepada masyarakat setempat adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan. Untuk menyediakan lokasi promosi atau pemasaran yang lebih baik, pemerintah desa juga harus bekerja sama dengan pihak terkait. Dengan adanya tanggung jawab pemerintah.

SIMPULAN DAN SARAN

Pertama, desa Mampu memanfaatkan kesimpulan sebagai motivasi pengembangan wisata bahari. Pemerintahan Kedungpandan memainkan peran yang signifikan dalam menjaga kelestarian pariwisata dan lingkungan serta mendorong masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan wisata



bahari. Teori pengembangan pariwisata Pitana dan Gayatri menyatakan bahwa peran pemerintah desa sebagai motivator telah berhasil dilaksanakan,

pemerintah desa sebagai fasilitator belum berfungsi secara memadai. Pengembangan wisata bahari Tlocor dihalangi oleh kekurangan anggaran pemerintah desa Kedungpandan. Karena pemerintah desa tidak dapat menyediakan fasilitas wisata seperti arena outbond dan tempat foto. Itu artinya Artinya, objek wisata ini bahkan tidak dimiliki secara resmi oleh pemerintah desa. Hal ini sangat penting untuk mencegah konflik kepemilikan tempat wisata di masa depan. Pemerintah desa harus bekerja sama dengan investor dan pihak swasta untuk mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur objek wisata agar lebih menarik bagi wisatawan.

Ketiga, fungsi pemerintah desa sebagai penggerak. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata, pemerintah desa bertanggung jawab untuk mendorong warga setempat untuk berpartisipasi. Indikator ini, menurut Pitana Gayatri, menunjukkan bahwa pemerintah harus mengajar, melatih, dan mendorong masyarakat untuk belajar membuat kerajinan tangan dengan menggunakan sumber daya alam lokalnya. Karena pemerintah desa Kedungpandan gagal memaksimalkan potensinya, ini dianggap tidak berhasil. Akan lebih bermanfaat jika pemerintah Desa Kedungpandan dapat memberikan kesempatan, dana serta lokasi penjualan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ababil, A. A. (2022). Peran BUMDes dalam Mengelola Desa Wisata Bukit Keki sebagai Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmiah Aset*, 97-112.
- Agustina, H. A. (2021). TATA KELOLA PENGEMBANGAN OBJEK WISATA BAHARI TLOCOR DALAM MENARIK WISTAWAN DOMESTIK (Studi Kasus Wisata Bahari Tlocor Dusun Tlocor Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Respon Publik*, 9-11.
- Islamiyah Rakhmah, D. (2019). Strategi Pengembangan Objek Wisata Pulau Lusi Di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *Swara Bhumi*, 77-85.
- Iswanti, S. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. ... : *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 92-103.
- Khikmawati, L. (2022). Model Pengembangan Wisata Bahari Dalam Meningkatkan Minat Kunjungan Wisatawan Model Development Marine Tourism in Increasing the Interest of Tourist Visits. *Jurnal Kebijakan Publik*, 413-420.
- Kusumo, D. (2023). Enhancing Seaweed-Based Dodol Production in Coastal Communities: A Case Study of *Gracillaria verrucosa* in Wisata Bahari Tlocor, Indonesia. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 1-12.
- Manajemen, P. (2023). Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pasca Covid Melalui Ekowisata Bahari di Kabupaten Sidoarjo. 112-124.
- Medi, R. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Buntu Burake di Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 1-12.
- Moleong, L. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1-9.
- Murdyastuti, A. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Perubahan Pariwisata Osing Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. *Journal of Tourism and Creativity*, 117.
- Nikodimus, N. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Ekowisata Danau Jemelak. *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 67-75.
- Novitasari, Y. (2022). The Role of Pokdarwis in Product Development of Lusi Island Tourism Objects.



Indonesian Journal of Public Policy Review, 1-6.

- Nugrahaeni, R. (2015). Motivasi Karyawan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1689-1699.
- Sumarno, G. d. (2009). Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. *ANALISIS PENGARUH BOOKVALUE PER SHARE TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN DI BURSA EFEK JAKARTA (STUDI KASUS PERUSAHAAN KELOMPOK LQ-45)* Oleh, 1-8.
- Syaifudin, M. Y. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). *Publika*, 365-380.
- Tui, F. P. (2023). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kawasan Pesisir Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 332-342.
- Umarella, U. (2022). Peran Pemerintah Negeri Nusaniwe, Kota Ambon dalam Pengembangan Obyek Wisata Paralayang di Bukit Ruhatu. *Jurnal Masohi*, 82.
- Wicaksana, A. (2018). Tinjauan Pustaka. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10-27.
- Yelvita, F. S. (2022). Bab 2 metode penelitian. *הארץ*, 2003-2005.
- Yelvita, F. S. (2022). Peraturan Daerah Jawa Timur No. 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata. *הארץ*, 2003-2005.
- Zizwatin Ainia, D. (2021). Peran Pemerintah Desa Sekapuk Dalam Pengembangan Objek Wisata Bukit Setigi Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik. *Jurnal Respon Publik*, 57-63.